



Tribun Manado (Hal. 17)

Jum'at, 28 Februari 2020

## Hasan: Harusnya Putus Kontrak

### ► Proyek Belum Kelar hingga Waktu Adendum

**BITUNG, TRIBUN** - Hingga batas waktu adendum, 19 Februari 2020 batas waktu pengerjaan proyek di Kota Bitung Provinsi Sulut masih tak kunjung selesai.

Hal ini membuat Komisi III DPRD Bitung bidang pembangunan berangkat, mereka pun mendatangi dan melihat langsung kondisi proyek yang belum kelar di SMP 12 Bitung di Kelurahan Wangurer Barat dan SMP 19 Bitung di Kelurahan Bitung Barat 2.

Vivi Ganap ketua Komisi III mendatangi satu diantara proyek pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas pada Kamis pekan lalu dan Hasan Suga Wakil ketua Komisi III mendatangi lokasi itu Minggu kemarin.

"Hingga lewat waktu adendum proyek itu tak selesai, kami memang sudah menduga ketika datang melakukan pengecekan 29 Januari 2020," kata Vivi Ganap ketua Komisi III DPRD Bitung, Kamis (27/2/2020).

Dia jelaskan untuk proyek pembangunan ruang kelas di SMP 12 Bitung nilai kontrak Rp 1 miliar lebih dengan waktu kontrak 15 Oktober 2019 dan jangka waktu pekerjaan 70 hari kalender.



**Harusnya dinas terkait melakukan pemutusan kontrak hingga Black list ke perusahaan atau pihak ketiga yang tak becus mengerjakan proyek.**

**HASAN SUGA**

Wakil ketua Komisi III DPRD Bitung

Sedangkan proyek pembangunan baru, ruang guru dan ruang kelas untuk SMP 19 di Kelurahan Bitung Barat 2 menyedot anggaran hampir rp 2 miliar lebih.

"Harus dipertanyakan apakah pihak yang mengerjakan proyek itu membayar denda, karena sudah lewat waktu pengerjaan dan adendum," tegasnya.

Kedua proyek yang menuai sorotan itu, dibawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung.

Menurut Hasan Suga Wakil ketua Komisi III DPRD Bitung, dari hasil pengecekan untuk di SMP 12 dari 4 ruang

kelas belum sepenuhnya rampung.

Ada bagian yang tembok belum selesai, begitu juga dengan di SMP 19 bangunan baru dan perkantoran belum selesai hingga masa adendum tanggal 19 Februari 2019.

"W"Harusnya dinas terkait melakukan pemutusan kontrak hingga Black list ke perusahaan atau pihak ketiga yang tak becus mengerjakan proyek," kata Hasan.

Untuk itulah melihat kondisi pekerjaan proyek yang tak kunjung beres, pihaknya akan menyoroti pembangunan yang bersumber dari dana kelurahan 2020 agar tidak seperti pekerjaan tahun sebelumnya.

Pihaknya akan mendesak pihak eksekutif untuk membuka mata anggaran, dan pengelolaan dana kelurahan dari bagian Keuangan Kota Bitung agar tepat sasaran.

"Apalagi informasi yang kami terima pekerjaan dana kelurahan oleh kelompok masyarakat (Pokmas), harus dilihat legalitas, keabsahan pokmas itu jangan nanti akan kelola dana kelurahan baru terbentuk pokmasnya. Begitu juga dengan kontraktor, jangan berikan pekerjaan ke mereka yang blacklist," tegasnya. (crz)



**BELUM RAMPUNG** - Proyek di Dinas pendidikan dan kebudayaan di Kota Bitung belum rampung hingga lewat waktu adendum 19 Februari 2020.